



# KEBIJAKAN PUBLIK

DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN

*Rumah Layak Huni*



Yakop Noho Nani  
Rustam Tohopi  
Fenti Prihatini Tui

# KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Yacob Noho Nani  
Rustam Tohopi  
Fenti Prihatini Tui



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Penulis:  
Yacob Noho Nani  
Rustam Tohopi  
Fenti Prihatini Tui

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
v, 88, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-255-7

Cetakan Pertama:  
Januari 2024

---

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## **PRAKATA**

Buku kebijakan publik dalam perpektif pembangunan rumah layak huni (Mahyani) adalah kajian implementasi kebijakan publik yang memotret pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Setelah adanya otonomi daerah banyak menimbulkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik dengan baik, olehnya pemerintah daerah sering memotret pembagian pengelolaan wilayah serta sumberdaya lainnya sebagai sebuah kekuasaan pemerintahan.

Buku ini mengkaji secara sederhana proses implementasi kebijakan publik tentang pembangunan rumah layak huni (Mahyani) yang setiap tahunnya menjadi program prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah. Disisi lain dalam pengentasan kemiskinan tersebut dibutuhkan peran stakeholder para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan, pers (media) serta lembaga swadaya masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan publik.

Buku ini hadir dengan asumsi dasar bahwa teori, metodologis, dan tujuan-tujuan analisis kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan perlu dibangun dengan keseragaman pengetahuan dan bukan perpektif yang berbeda-beda agar tidak berdampak pada implementasinya. Dari tulisan ini menekankan bahwa analisis kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan, kebijakan publik memiliki peran penting dalam membentuk tindakan pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kebijakan mencakup argumentasi dan debat publik, yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang kritis, analitis, dan inovatif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengintegrasikan pemikiran kritis, inovasi, dan antisipasi terhadap perkembangan masa depan, sehingga memberikan dampak positif dan relevan bagi masyarakat.

Buku ini hadir guna menambah khasanah pengetahuan bersama tentang kebijakan publik dalam pembangunan rumah layak huni (Mahyani) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Prakata .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
Bab 1 Pendahuluan .....	1
Bab 2 Implementasi Kebijakan Publik .....	6
A. Kajian Teoritis Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) .....	6
B. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik .....	9
C. Tinjauan Teori Sistem Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni .....	29
Bab 3 Kinerja Organisasi Publik .....	36
Bab 4 Pemberdayaan Masyarakat.....	43
Bab 5 Implementor Kebijakan.....	47
Bab 6 Strategi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	54
A. Strategi Bantuan Rumah Layak Huni .....	54
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	66
C. Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman.....	68
D. Strategi Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan Rumah Layak Huni .....	70
Bab 7 Alternatif Pengembangan.....	74
A. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Fakta Empiris .....	74
B. Model Pengembangan Kebijakan Teori Van Meter dan Van Horn ....	75
C. Faktor – Faktor Keberhasilan Kebijakan .....	77
Bab 8 Penutup.....	80
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>82</b>
<b>Profil Penulis.....</b>	<b>86</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan public seringkali mengalami hambatan dalam pencapaian keberhasilannya baik dari pelaksana kebijakan, penerima manfaat serta lingkungan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut sangat logis karena kebijakan merupakan sebuah siklus yang dijalankan secara berkesinambungan pada prioritas-prioritas penanganan permasalahan public secara rasional. Capaian keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya sampai bagaimana kebijakan itu dapat dijalankan dengan baik akan tetapi bagaimana tujuan dari kebijakan dapat dicapai sesuai dengan rumusan dasar dari permasalahan yang mendasari penerapan kebijakan publik. Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan adalah pemahaman yang sama dan konsistensi perilaku seluruh stakeholder kebijakan sebagai aktor kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

Disisi lain juga keberhasilan kebijakan perlu memperhatikan strategi secara tepat dalam mengintervensi berbagai permasalahan sosial agar pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan tujuan dan sasaran secara tepat. Dalam pandangan Robbins terdapat beberapa pendekatan dalam pencapaian kinerja (efektifitas) adalah: a) pendekatan pencapaian tujuan, b) pendekatan sistem, c) pendekatan konstituen strategis, dan d) pendekatan kartu skor berimbang (Robbins, 2014). Sedangkan Sabatier (1986 : 21-48) secara spesifik menyebutkan terdapat dua model implementasi kebijakan yakni pendekatan top-down dan bottom-up (P. A. Sabatier, 1986). Pendekatan top down mencakup model elite, model proses dan model inkremental sedangkan model bottom-up diwakili oleh model kelompok dan model kelembagaan.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni yang dijalankan oleh pemerintah selama ini pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 32

Tahun 2018 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dimana pemenuhan tempat tinggal merupakan salah satu indikator kemiskinan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Nilsen (2011) dalam Eliza & Dewi (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya (Eliza & Dewi, 2020).

Bantuan rumah layak huni (Mahyani) adalah salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun terdapat indikator lain yang bersinggungan. Dari data (BPS 2023) persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023). Sedangkan dilihat dari data persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2021 (0,72%), tahun 2022 (0,85%) sedangkan pada tahun 2023 (0,74%).

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemiskinan Kabupaten Gorontalo jumlah keluarga miskin tahun 2019 sebanyak 46.159 KK (Perkim 2021). Dalam data BPS tahun 2021 Jumlah penduduk miskin 68.310 jiwa atau sebesar 18,06% (2019) 66.720 jiwa atau sebesar 17,59% (2020) dan 67.210 jiwa atau sebesar 17,8% (2021). Kabupaten Gorontalo meskipun memiliki keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan akan tetapi Kabupaten Gorontalo memiliki indeks keparahan kemiskinan yang relative

## BAB 2

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

### **A. KAJIAN TEORITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI)**

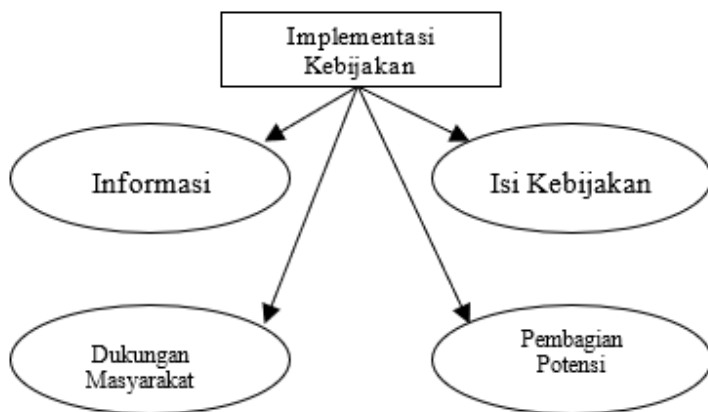
Banyak referensi yang telah menguraikan tentang kebijakan publik atau implementasi kebijakan publik. Namun penulis mengutip pendapat dari Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi kebijakan berarti upaya mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan (Daniel, 2012; P. Sabatier, 2005). Berdasarkan teori ini menegaskan bahwa peraturan-peraturan menjadi fondasi utama dalam proses penguatan program-program pemerintah baik pemerintah pusat sampai daerah dan atau regulasi yang dibuat langsung oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan keputusan dalam kebijakan. Pembangunan rumah layak huni oleh karena sumber pembiayaan sebagian bersumber dari anggaran APBN dan APBD, sifatnya bantuan kepada masyarakat maka dibutuhkan regulasi untuk legalitas hukumnya.

Implementasi kebijakan merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik dalam bentuk program yang terstruktur dan terencana dalam kegiatan-kegiatan, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat self executed, yakni yang dapat langsung dilaksanakan namun tidak berpengaruh dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai (Hupe & Hill, 2021). Meningkatnya kompleksitas permasalahan global memicu peningkatan fokus pada penyelesaian masalah yang memberatkan masyarakat dan pemerintah terutama bentuk bantuan pembangunan rumah layak huni, kerap kali menuai kecaman yang berulang, sehingga menyudutkan posisi peran pemerintah yang lemah bagi masyarakat

penerima manfaat, (Septiana et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas dalam tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintah selama beberapa dekade terakhir, (Fischer et al., 2007). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terpusat dan efisien kemungkinan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kompleks di masa depan. Menurut (Agustino, 2008) mengenai kebijakan merupakan rangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan adanya hambatan dan kesempatan. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, tujuan dari kebijakan tersebut tetaplah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga dari konsep ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan diberbagai konteks. Dalam konteks prosedur, kebijakan menitikberatkan pada menghasilkan informasi terkait masalah, perencanaan masa depan, implementasi aksi, evaluasi hasil, dan penilaian kinerja kebijakan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses kebijakan publik mencakup tidak hanya perumusan kebijakan, tetapi juga pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan, (Alamsyah, 2016).

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, 2) sasaran program yakni masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 3) adanya pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi, (N. Tresiana & Duadji, 2021). Proses implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah konkret. Dimulai dari menguraikan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang awalnya bersifat umum, kemudian merancang program-program aksi yang terinci, serta mengalokasikan dana/biaya yang cukup untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Dengan demikian, kesuksesan implementasi kebijakan sangat tergantung pada perincian yang jelas, perencanaan program aksi yang matang, dan alokasi sumber daya yang memadai, (Taufiqurokhman, 2014).

Kajian dalam pendekatan kebijakan publik pada tataran implementatif seringkali terjadi perbedaan persepsi yang mengakibatkan tidak lancarnya implementasi kebijakan tersebut dengan baik. Kebijakan publik dalam bentuk



Gambar 2.7. Model Implementasi Kebijakan Jan Merse (dalam Kadji, 2015:71)

Dari ilustrasi gambar tersebut bahwa informasi dan isi kebijakan menjadi aspek kunci dalam implementasi kebijakan. Namun, keduanya tidak cukup tanpa keterlibatan masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun partisipasi langsung. Pembagian potensi juga menjadi faktor krusial dalam menjalankan kebijakan. Baik implementor maupun masyarakat yang terlibat perlu memiliki potensi yang sesuai dengan tugas yang akan diemban, sehingga kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan pembuat kebijakan dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh target kebijakan. Dengan demikian, kesuksesan implementasi kebijakan melibatkan sinergi antara informasi, isi kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan pembagian potensi yang optimal.

8. Model Implementasi Kebijakan Menurut Warmic

Sebagaimana disampaikan oleh Warmic dalam Kadji (2015:71), adalah bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut mencakup: a) Kemampuan Organisasi; b) Informasi; c) Dukungan; dan d) Pembagian potensi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat diakui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan organisasi, ketersediaan informasi, dukungan, dan pembagian potensi yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat pada berikut:

sertaan" atau "*inclusion*". Selama tahap pengikut-sertaan, elemen-elemen baru tersebut diintegrasikan ke dalam sistem melalui "generalisasi nilai" atau "*value generalization*". Artinya, nilai-nilai baru yang muncul dari perkembangan tersebut diakui dan diaplikasikan ke dalam sistem secara umum. Sebagai contoh, pernyataan tersebut memberikan contoh bahwa melalui evaluasi, muncul generalisasi nilai baru, yaitu filsafat individualistis yang menekankan hak-hak pribadi atau individu, menggantikan nilai kepentingan bersama atau "*collective rights*". Proses ini mencerminkan bagaimana sistem dapat beradaptasi dengan perkembangan nilai atau elemen baru dengan cara mengintegrasikannya dan mengakui nilai-nilai baru tersebut sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa kritik utama terhadap teori Talcott Parsons adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan fenomena revolusi dalam masyarakat. Kritik ini bersumber dari perbedaan mendasar antara evolusi dan revolusi. Revolusi dianggap terjadi secara cepat dan seringkali melibatkan kekerasan atau paksaan, tidak mengikuti tahap-tahap perubahan sosial yang dijelaskan oleh Parsons dalam teorinya.

Dalam konteks teori Parsons, fokusnya lebih pada evolusi masyarakat menuju kondisi modern. Namun, kritik mengemukakan bahwa teori ini kurang mampu menjelaskan perubahan yang bersifat revolusioner, di mana masyarakat dapat mengalami transformasi mendadak dan melibatkan perubahan yang drastis, bahkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tahapan yang diuraikan oleh Parsons.

Selain itu, kritik juga menyoroti kekurangan dalam menjelaskan secara rinci bagaimana suatu masyarakat bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya dalam teori Parsons. Ini menunjukkan bahwa pendekatannya mungkin terlalu umum atau abstrak, sehingga kurang memadai untuk merinci perubahan yang kompleks dan heterogen yang dapat terjadi dalam masyarakat. Kritik semacam ini mendorong pemikiran bahwa teori Parsons mungkin perlu diperluas atau diperbarui agar lebih mencakup variasi dan kompleksitas dalam dinamika perubahan sosial.

## BAB 3

# KINERJA ORGANISASI PUBLIK

Secara sederhana Price (1968) menganggap bahwa kinerja identik dengan efektivitas organisasi, dan mengidentifikasi sebagai kriteria penghargaan: produktivitas, kesesuaian, dan pelembagaan. Sedangkan Moh (1972) mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja: produktivitas, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi.

Lupton (1977) memperlakukan gagasan kinerja organisasi dengan cara yang paling hati-hati dan jelas dibandingkan dengan peneliti lain pada periode yang sama. Menurut Lupton, dalam organisasi yang efektif, tingkat produktivitas dan tingkat motivasi dan kepuasan para anggotanya adalah: tinggi, sementara tingkat pergantian, biaya, kerusakan tenaga kerja rendah atau tidak ada. Namun, menurut Katz dan Kahn (1978), efektivitas dan efisiensi suatu organisasi serupa, dan keduanya merupakan komponen penting dari kinerja organisasi global, yang dapat dinilai melalui pemaksimalan semua jenis pengembalian.

Manajemen kinerja dalam organisasi sektor publik memiliki peran yang sangat penting. Pengelolaan kinerja yang efektif dapat mengurangi inefisiensi karyawan dan sistem, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas keseluruhan organisasi. Selain itu, manajemen kinerja yang baik dapat membantu meminimalkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi organisasi secara menyeluruh, (Asif & Rathore, 2021). Lebih lanjut, kesimpulan tersebut menyiratkan bahwa manajemen kinerja yang efektif tidak hanya berdampak pada aspek internal organisasi, tetapi juga dapat menciptakan hasil yang lebih baik dalam hal kepuasan warga dengan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja yang baik memiliki dampak positif tidak hanya pada kinerja internal organisasi tetapi juga pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, konsep ini

menekankan pentingnya peran manajemen kinerja dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan kepuasan dalam konteks sektor publik.

Pada 1980-an, pengertian tentang kinerja mengalami sedikit perubahan seperti dalam pandangan (Porter, 1986) bahwa kinerja sangat ditentukan pada kemampuannya untuk menciptakan nilai bagi kliennya. Pandangan ini akan mengantarkan pemahaman pada sebuah upaya untuk meningkatkan kepuasan bagi yang dilayani.

Sementara Robbin (1987) lebih melihat pada aspek sosial dimana kinerja merupakan sejauh mana suatu organisasi sebagai sistem sosial yang dapat mempertimbangkan baik sarana maupun tujuannya.

Cherrington (1989) menganggap kinerja sebagai konsep keberhasilan atau keefektifan suatu organisasi, dan sebagai indikasi cara organisasi itu bekerja secara efektif untuk mencapai tujuannya dengan sukses. Kinerja dapat dipahami sebagai gabungan antara efektivitas dan efisiensi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Penilaian kinerja sektor publik seringkali melibatkan indikator-indikator yang memungkinkan perbandingan antar negara di tingkat internasional.

Pentingnya memahami kinerja bukan hanya dari perspektif efisiensi, yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal, tetapi juga dari segi efektivitas, yaitu kemampuan mencapai tujuan dan memberikan hasil yang diinginkan. Kondisi ini mencerminkan pengakuan bahwa baik sektor publik maupun swasta perlu dikelola dengan baik untuk mencapai keseimbangan antara mencapai tujuan yang diinginkan (efektivitas) dan melakukannya dengan cara yang paling efisien mungkin (Kazho & Atan, 2022).

Pendekatan internasional dalam menilai kinerja sektor publik menyoroti pentingnya membandingkan kinerja antar negara untuk memahami praktek terbaik dan peluang perbaikan. Ini menekankan pentingnya melihat kinerja dalam konteks global, yang dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai cara berbagai sektor memenuhi tuntutan efektivitas dan efisiensi di berbagai negara.

Kinerja organisasi sangat tergantung pada kualitas kinerja individu. Pentingnya memastikan kualitas kinerja organisasi yang tinggi melibatkan memberikan paparan secara teratur kepada para pekerja mengenai pengetahuan dan keterampilan baru dan terkini (Kazho & Atan, 2022). Hal ini dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa pekerja dapat

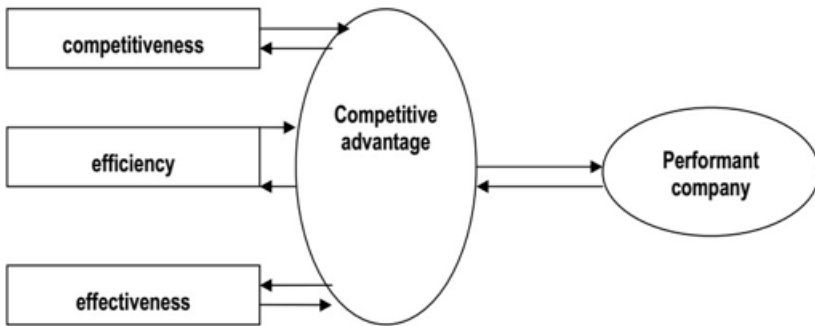
terus mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Dengan demikian, memberikan peluang kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dianggap sebagai strategi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Ini tidak hanya membantu individu untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan daya saing organisasi di pasar luas.

Pemahaman penting untuk menempatkan pemberitahuan identitas antara kinerja dan efisiensi dalam suatu entitas, baik itu organisasi atau individu. Hal ini melibatkan evaluasi hasil yang diperoleh oleh entitas tersebut dalam kaitannya dengan sumber daya yang digunakan. Artinya, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga sejauh mana sumber daya dimanfaatkan secara efisien. Pemahaman kinerja juga diasosiasikan dengan tindakan dan perilaku tertentu, yang dilihat dalam konteks dinamis, yang berarti sebagai suatu proses yang terus bergerak dan berkembang. Ini berbeda dengan pandangan statis yang hanya melihat kinerja sebagai hasil akhir tanpa mempertimbangkan aspek dinamis dan perubahan dalam organisasi. Sedangkan dalam konteks organisasi, menegaskan bahwa organisasi yang efektif dengan standar tingkat kinerja yang tinggi adalah organisasi yang mampu memenuhi tuntutan para pemangku kepentingannya. Dengan demikian, fokus pada hasil yang diperoleh tidak hanya mencakup dimensi internal organisasi, tetapi juga melibatkan respons dan pemenuhan terhadap harapan dan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan eksternal.

Definisi kinerja organisasi pada prinsipnya difokuskan pada kapabilitas dan kemampuan suatu organisasi untuk secara efisien memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai prestasi yang konsisten dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan, serta mempertimbangkan relevansinya. kepada penggunaannya (Peterson et al., 2003).

Verboncu dan Zalman (2005) menghargai bahwa kinerja adalah hasil tertentu yang diperoleh dalam manajemen, ekonomi, dan pemasaran yang memberikan karakteristik daya saing, efisiensi, dan efektivitas organisasi dan komponen struktural dan proseduralnya.



Gambar 3.1 Kinerja Organisasi Verboncu dan Zalman (2005)

Meskipun dalam tahun 1992 telah dirumuskan satu model kinerja dengan priada terbalik akan tetapi dalam pendekatannya yang talah menggabungkan kinerja organisasi secara top down dan bottom up sebagaimana *Piramida Kinerja*. Itu diusulkan oleh Cross dan Lynch (1992), sebagai berikut :



Gambar 3.2. Piramida Kinerja (Tangen, 2004)

Secara implementatif capaian kinerja secara garis besar Standar kinerja organisasi publik seringkali hanya merupakan persoalan manajer atau atasan, tetapi tidak pernah disosialisasikan, dan dijelaskan dan dihayati dengan benar oleh para karyawannya. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh (Yuwono, 2008)

## BAB 4

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995)

Menurut Munawar (2011) Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI” . Lahirnya otonomi daerah juga salah satunya juga dilandasi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana lahirnya otonomi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa hal yang mendorong penerapan otonomi adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam

pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : **Pertama**, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. **Kedua**, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. **Ketiga**, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social (Munawar, 2011)

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam rangka untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indoensia oleh kaerena itu semangat dalam beberapa ketentuan diatas merupakan sebuah manifestasi dari pelaksanaan program-program pemberdayaan oleh masyarakat dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan..

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut Nilsen (2011) dalam Eliza (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya (Eliza & Dewi, 2020). Kemiskinan selalu berkembang dalam pola-pola tertentu antara lain ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sumarto et al., 2014).

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan

## BAB 6

# STRATEGI KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Gorontalo dijalankan melalui dua strategi utama kebijakan, yakni : 1) Strategi pemberian Bantuan Rumah Layak huni mandiri bagi masyarakat; 2) Strategi peningkatan keberdayaan masyarakat; 3) strategi pembangunan kawasan permukiman yang asri bagi masyarakat. Dari beberapa strategi tersebut dijalankan melalui tahapan-tahapan kebijakan yakni tentang perencanaan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan kebijakan. Disamping disamping beberapa strategi diatas juga dilakukan pelaksanaan program pembangunan kawasan permukiman khusus.

### **A. STRATEGI BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI**

#### **1. Perencanaan Program Bantuan**

Model perencanaan yang dikembangkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni dijalankan dengan dua pendekatan, pertama adalah pendekatan secara top down dan kedua adalah pendekatan secara bottom up. Yunus (2014:173) menegaskan bahwa didalam pelaksanaan diperlukan perencanaan antara yakni rencana yang menghubungkan sasaran strategi dengan perencanaan operasional. Perencanaan jenis ini, disebut juga program yang meliputi ruang lingkup yang luas, waktu yang memadai, bersifat komprehensif, serta memiliki rincian secara detail. Jadi tugas program tersebut adalah menjabarkan kebijakan ke dalam tugas operasional.

## BAB 8

### PENUTUP

Implementasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan dan peningkatan kinerja kebijakan organisasi oleh pemerintah daerah.

Pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berupa pemberdayaan penerima bantuan perumahan layak huni baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang berimplikasi pada peningkatan keterbukaan kebijakan, kelancaran komunikasi dan meningkatkan sumber daya kebijakan melalui berbagi dengan masyarakat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni perlu memperhatikan Standar Operasional Prosedur sebagai dasar proses percepatan implementasi kebijakan yang tetap sasaran. Dimana penerima diharapkan memahami benar proses rekrutmen sampai dengan benefit value dari sebuah bantuan yang diterima oleh masyarakat. Perlu menguatkan komunikasi terbuka dan transparan keseluruhan lini organisasi pelaksana program, sehingga bisa satu visi yang sama untuk menyelenggarakan Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo.

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari penulisan buku ini yang dihasilkan dari hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Gorontalo. Adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi Kebijakan Pemberian Bantuan Rumah layak Huni
  - a. Pelaksanaan kebijakan program bantuan perumahan dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 1) tahap perencanaan pelaksanaan kebijakan, 2) tahap implementasi kebijakan, dan 3) tahap monitoring dan evaluasi.
  - b. Proses perencanaan pelaksanaan kebijakan dijalankan berdasarkan model top down dan bottom up pada aspek-aspek yang berbeda

- c. Program implementasi kebijakan dijalankan melalui proses pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam implementasi kebijakan perumahan rumah layak huni.
  - a. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat
  - b. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui proses pendampingan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh fasilitator program
  - c. Proses pemberdayaan dilakukan dalam implementasi kebijakan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek penerima manfaat dari program kebijakan
3. Strategi Pengembangan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Gorontalo
  - a. Kawasan permukiman dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan sesuai dengan RTRW daerah
  - b. Dalam pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan karakteristik kawasan seperti kawasan pertanian, perdagangan, peternakan, pelabuhan dan bandara, kawasan kumuh, kawasan perkotaan dan kawasan terpencil dan lain sebagainya.
4. Pengembangan kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gorontalo
  - a. salah satu kelemahan dari implementasi kebijakan kurangnya basis data dalam pelaksanaan kegiatan
  - b. Pemerintah lebih mengejar efektifitas kebijakannya pada keberhasilan kebijakan sehingga model akuntabilitas masih bersifat akuntabilitas secara formal dan belum mengarah pada akuntabilitas publik
  - c. Pendekatan implementasi dijalankan berdasarkan prosedur formal semata-mata seperti SOP sehingga kegiatan sangat prosedur akan tetapi disisi lain masyarakat memerlukan kinerja pelayanan yang lebih maksimal dan dapat dijalankan melalui Standart Operasional Bersama (SOB)
  - d. Diperlukan pengembangan model kebijakan publik yang disebut dengan *policy control system implementation*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A. (1983). Bantuan Hukum Sebagai Sarana Menanggulangi Masalah Kemiskinan Struktural. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no1.942>
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (CV. Alfabeta, Ed.; Edisi 1). CV. Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* (Kamal Alamsyah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Media Citra Mandiri Press.
- Alba, Amru., & Kurniawan, Rudi. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.” *UNIMAL Press*, 1, 1–128.
- Arief Effendi, Muh., K. (2009). *The power of good corporate governance : teori dan implementasi* (K. Krista, Ed.). Salemba Empat.
- Asif, A., & Rathore, K. (2021). Behavioral Drivers of Performance in Public-Sector Organizations: A Literature Review. *SAGE Open*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/2158244021989283>
- Daniel, S. P. & M. (2012). Conceptual Framework the Implementation of Public Policy : a Framework of. *Academia*, 2–25.
- Dwiyanto. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Fisipol UGM.
- Eka Suputra, I., & Martini Dewi, N. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2), 105–112.
- Eliza, Y., & Dewi, A. S. (2020). Multisektor Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000–2018. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*.
- Hupe, P., & Hill, M. (2021). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance. *Implementing Public Policy*. <https://www.torrossa.com/it/resources/an/5282218>
- Indonesia, P. P. R. (2018). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. In *World Development* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–15).

- Indrajit, E. R. (2013). Akselerasi Implementasi E-Government. *SERI 999 E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi*, 1–6.
- Indrajit, E. R. (2016). *Konsep Strategi Electronic Government: Vol. Desember 2016*.
- Indrayani, E. (2016). *E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Kadji, Y. (2015a). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (E. A. Sujianto, Ed.). Universitas Negeri Gorontalo Press. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/3/89/formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik-kepemiminana-dan-perilaku-birokrasi-dalam-fakta-realitas.html>
- Kadji, Y. (2015b). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas: Vol. Nopember 2015*.
- Kazho, S. A., & Atan, T. (2022). Public Sector Downsizing and Public Sector Performance: Findings from a Content Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/su14052989>
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Grasindo.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan masyarakat*. 1(2), 87–99.
- Nurmaya, L., & Febrina, R. (2021). *Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen ASN di Kabupaten Kampar*. 3(1).
- Parsons, T. (1968). *The Structure of Social Action* (Vol. 1, Issue 1).
- Peterson, W., Gijssbers, G., & Wilks, M. (2003). An Organizational Performance Assessment System for Agricultural Research Organizations: Concepts, Methods, and Procedures. *International Service for National Agricultural Research (ISNAR)*.
- Pramono, J. S. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.; 10th ed.). Unisri Press.
- Prapto, Y., Suradinata, E., Mulyati, D., & Thahir, I. (2019). Implementation of Community Policing Policy In Creating General Security and Order

- in The City of Bandung, West Java Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 387. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14809>
- Ritzer, G. (2014). *The Blackwell Companion to Major Social Theorists*. <https://www.researchgate.net/publication/200027196>
- Robbins, S. P. and T. A. J. (2014). *Organizational behavior*. Pearson College.
- Sabatier, P. (2005). From Policy Implementation to Policy Change: A Personal Odyssey. In *Higher Education Dynamics* (Vol. 8, Issue 1973, pp. 17–34). Springer, Dordrecht. [https://doi.org/10.1007/1-4020-3411-3\\_2](https://doi.org/10.1007/1-4020-3411-3_2)
- Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>
- Septiana, A. R., Zahari, A. F. M., & Tohopi, R. (2020). Policy Implementation: The Strengthen Communication In Fishermen Insurance Government Program (BPAN) Tanggetada District, Kolaka Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 10(2), 507–517. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.16198>
- Setiawati, B. (2020). Optimalisasi Kinerja Pelayanan Sektor Publik Berbasis Pelaku (Individu). *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4(1), 53–64.
- Sumarto, Sudarno, Vothknecht, Marc, Wijaya, & Laura. (2014). *Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty : Evidence from Decentralized Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty : Evidence from Decentralized Indonesia* (Issue 57823).
- Suwitri, S. (2011). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Pidato Pengukurah Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Publik*, 6(3), 1–51.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Ed.; Cetakan 1). AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad 2006.

- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah* (Cet. 1.). Alfabeta.
- Tangkilisan. (2007). *Manajemen Publik*. . PT. Gramedia.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Vol. 1).
- Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik* (N. dan D. N. Tresiana, Ed.; 1st ed.). Suluh Media.
- Wahab Abdul, S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (edisi kedua). Bumi Aksara.
- Widodo. (2006). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedai Publishing.
- Wulandari, C. Y. (2017). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservasi Lingkungan Melalui Usaha Kerajinan Tangan Ban Bekas Di Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga*. 14–205.
- Yuwono, T. (2008). Menggagas Kinerja Birokrasi Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 2(1), 1–10.

## ***PROFIL PENULIS***



Yacob Noho Nani, lahir di Gorontalo tanggal 21 November 1975. Mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 2000 dan pernah menduduki jabatan struktural pada beberapa posisi yakni : 1) Staf umum pada Bawasda Kabupaten Gorontalo (2000-2001), 2) Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo; 3) Pjs Sekretaris Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara (2005), 4) Kepala Sub Bidang Amdal Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango (2014); 5. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango (2008-2013). Sekarang Aktif sebagai dosen tetap pada program studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo sejak 2017 sampai sekarang. Dan telah menyelesaikan pendidikan Doktor pada tahun 2021.



Rustam Tohopi, Lahir di Monano, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 24 Maret 1979. Menyelesaikan pendidikan Formal di SDN Inpres Monano lulus Tahun 1991, MTs Annur Monano lulus Tahun 1994 sebagai tanah kelahiran sendiri, selanjutnya melanjutkan di sekolah MA Muhammadiyah di Kota Gorontalo lulus Tahun 1997. Kemudian melanjutkan

Studi ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tahun 1997 dan menyelesaikan S1 tersebut di Perguruan Tinggi IKIP Negeri Gorontalo Tahun 2003. Ditahun 2010 melanjutkan studi

Program Magister Administrasi Pembangunan memilih Konsentrasi Manajemen Publik di FISIP UNHAS Makassar dan selesai Tahun 2013 dan Program Doktor di Bidang Administrasi Publik Bidang Kajian Utama Kebijakan Publik di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2022.

Semasa menjadi Dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo pernah menduduki jabatan sebagai Gugus Kendali Mutu di Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Tahun 2014-2015. Kemudian pada tahun 2015 -

2016 menjadi Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi. Semasa menjabat Sekretaris Gugus Penjamuna Mutu Fakultas Ekonomi. Pada tahun yang sama penulis dipercayakan sebagai Sekretaris Tim Penyusun Dokumen Pembentukan Prodi S1 Administrasi Publik, dan di tahun 2016 juga dipercayakan Pimpinan Universitas dan Fakultas menjadi Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik dari tahun 2016 sd. 2019 pertama kalinya. Selain itu aktif dalam kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru sejak tahun 2017.

Saat ini penulis dipercayakan menjabat sebagai Sekretaris Jurusan S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial sejak April 2021 dan ditahun yang sama mendapatkan kepercayaan dari KemenPANRB RI sebagai Tim Pendamping Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo tahun 2021 serta sebagai Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tahun 2021 Bidang Akademik dari Belmawa dan Kemendes RI.

Penulis juga pernah menjadi Tim Peneliti kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sulut tahun 2021. Di tahun 2022 ini menjadi Tim Peneliti kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan BPK RI. Tim Ahli Riset SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dan di Tahun 2023 menjadi Tim Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Semasa mengenyam pendidikan juga aktif dalam berbagai organisasi baik Intra maupun ekstra kampus. dimulai dari HMPS, HMJ, SENMA dan BEM, Resimen Mahasiswa (Menwa), Pramuka, KSR dan SAR. Saat ini, penulis berdomisili di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.



### **Fenti Prihatini Tui**

Lahir di Gorontalo 08 Februari 1978. Penulis merupakan Dosen Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2016. Penulis menempuh pendidikan pada S1 Pendidikan Ekonomi Perkantoran Universitas Negeri Gorontalo, S2 Administrasi Pembangunan di Universitas Hasanuddin Makasar, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Selain sebagai tenaga pengajar penulis juga pernah menjadi Ketua Program Studi Administrasi Publik Periode 2019-2021, Ketua Jurusan Administrasi Publik Periode 2021-2023, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan dan kegiatan penelitian dan pengabdian. Buku yang telah dihasilkan yaitu: (1) Kualitas Pelayanan Publik, dan (2) Administrasi Publik dan Pelayanan Publik. Selain itu juga penulis aktif dalam menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional.



# KEBIJAKAN PUBLIK

DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN

*Rumah Layak Huni*



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)

Ig : tahtamedigroup

Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-255-7



9

786231

472557